

STUDI KOMPARATIF MODEL PENDIDIKAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Setria Majuaita¹, Ridha Zulfatun Nafisah², Muktiningsih Nurjayadi^{*3}, Achmad Ridwan⁴
^{1,2,3,4}Universitas Negeri Jakarta

*Corresponding Author: muktiningsih@unj.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : Jan 08, 2026

Revised : Jan 29, 2026

Accepted : Feb 20, 2026

Available online : Feb 27, 2026

Kata Kunci:

studi komparatif, model pendidikan, sistem pendidikan, Indonesia, Amerika Serikat

Keywords:

comparative study, education model, education system, Indonesia, United States

ABSTRAK

Studi komparatif pendidikan berperan krusial dalam menganalisis respons sistem pendidikan nasional terhadap tantangan global serta dalam mengeksplorasi ruang pembelajaran kebijakan (*policy learning*). Artikel ini menyajikan kajian literatur komparatif yang bertujuan untuk menganalisis secara kritis perbedaan dan persamaan model pendidikan Indonesia dan Amerika Serikat, dengan fokus pada interaksi antara empat pilar utama: kurikulum, sistem evaluasi, tata kelola, dan profesionalisme guru. Penelitian menggunakan metode *narrative review* komparatif interpretatif terhadap sumber-sumber primer berupa artikel jurnal internasional dan jurnal nasional, dokumen kebijakan resmi, serta laporan lembaga multilateral yang diterbitkan dalam dekade terakhir (2015-

2025). Analisis tematik dan komparatif kontekstual mengungkapkan polarisasi paradigmatik. Indonesia menerapkan desentralisasi pendidikan yang terkendali dengan tetap memperkuat standar nasional melalui kebijakan Kurikulum Merdeka dan Asesmen Nasional, yang diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP/SLTP), hingga Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK). Sementara AS menganut desentralisasi kompetitif dengan otonomi luas di tingkat negara bagian dan distrik. Perbedaan ini menghasilkan *trade-off* antara keseragaman dan keadilan (*equity*) di Indonesia, serta inovasi dan fragmentasi di AS. Kajian menyimpulkan bahwa pengembangan kebijakan Indonesia memerlukan model hibrid yang memadukan kejelasan tujuan nasional dengan otonomi bermakna dan akuntabilitas konstruktif. Kontribusi artikel terletak pada sintesis integratif yang menawarkan implikasi kebijakan kontekstual, menghindari transfer kebijakan yang simplistik.

ABSTRACT

Comparative education studies play a crucial role in analyzing the response of national education systems to global challenges and in exploring policy learning. This article presents a comparative literature review that aims to critically analyze the differences and similarities between the Indonesian and US education models, focusing on the interaction between four main pillars: curriculum, evaluation systems, governance, and teacher professionalism. The research uses an interpretive comparative narrative review method of primary sources in the form of international and national journal articles, official policy documents, and reports from multilateral institutions published in the last decade (2015-2025). Thematic and contextual comparative analysis reveals a paradigmatic polarization. Indonesia implements controlled decentralization of education while maintaining national standards through the Merdeka Curriculum and National Assessment policies,

which are being implemented gradually and comprehensively from elementary school (SD), junior high school (SMP/SLTP), to senior high school and vocational school (SMA/SMK). while the US embraces competitive decentralization with broad autonomy at the state and district levels. These differences result in trade-offs between uniformity and equity in Indonesia, and innovation and fragmentation in the US. The study concludes that policy development in Indonesia requires a hybrid model that combines clear national objectives with meaningful autonomy and constructive accountability. The article's contribution lies in its integrative synthesis, which offers contextual policy implications and avoids simplistic policy transfers.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Universitas Bina Bangsa Getsempena



PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hal penting yang diakui oleh semua negara. Indonesia sangat memperhatikan pendidikan, tetapi ada banyak masalah yang menghalangi tujuan pendidikan. Masalah ini dibagi menjadi dua kategori masalah skala besar dan masalah skala kecil. Mikro mencakup proses belajar mengajar dan kondisi sekolah, sedangkan makro mencakup sistem dan kebijakan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, keduanya perlu diperhatikan (Kurniawati, 2022).

Pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Sistem pendidikan kedua negara dibentuk oleh latar sejarah, struktur pemerintahan, dan budaya yang berbeda, sehingga menghasilkan karakteristik yang unik pada masing-masing sistem pendidikan. Studi komparatif antara kedua sistem ini diperlukan untuk memahami bagaimana Indonesia dapat memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikannya melalui pembelajaran dari praktik internasional. Indonesia menerapkan sistem pendidikan yang terpusat, di mana kebijakan kurikulum, pemetaan struktur pendidikan, dan standar nasional diatur secara luas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). Sementara itu, di Amerika Serikat, pendidikan bersifat desentralisasi di mana masing-masing negara bagian memiliki kewenangan besar terhadap kebijakan dan implementasi pendidikan di wilayahnya sendiri (Hayuningrum & Muhtarom, 2024).

Salah satu aspek penting yang membedakan kedua negara adalah kurikulum dan tujuan pendidikan. Indonesia cenderung menerapkan kurikulum nasional yang menekankan pada nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan, sedangkan sistem pendidikan Amerika Serikat menekankan fleksibilitas kurikulum dan otonomi sekolah dalam menentukan pendekatan pembelajaran sesuai kebutuhan lokal dan global (Loka et al., 2025).

Selain struktur dan kebijakan, budaya pendidikan juga memberi warna yang berbeda. Budaya demokrasi dan partisipasi masyarakat yang kuat di Amerika Serikat

mempengaruhi cara sekolah dan komunitas belajar saling berinteraksi, sedangkan di Indonesia, nilai budaya lokal dan semangat kebersamaan menjadi kekuatan dalam pendekatan pendidikan kewarganegaraan dan karakter.

Penelitian komparatif ini tidak hanya memetakan perbedaan tetapi juga mencari titik temu dan rekomendasi untuk peningkatan pendidikan Indonesia. Misalnya, bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan praktik desentralisasi dan inovasi kurikulum di Amerika Serikat untuk meningkatkan relevansi pendidikan di tingkat lokal tanpa mengabaikan nilai nasional.

Berbagai studi jurnal telah dilakukan dalam bidang ini, seperti artikel komparatif sistem pendidikan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang membahas perbedaan kebijakan dan kualitas pendidikan, serta penelitian yang menggali filosofi pendidikan, pendekatan pembelajaran, hingga peran teknologi dalam pendidikan kedua negara (Loka et al., 2025)

Guru profesional di abad ke-21 adalah mereka yang memiliki kompetensi yang tinggi. Salah satu masalah yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah rendahnya kompetensi pedagogik guru. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan guru tidak memiliki kompetensi pedagogis yang cukup. Kurangnya pendidikan dan pelatihan pedagogis yang memadai, termasuk kemampuan mengajar dan teknik pembelajaran. Mereka mungkin tidak memahami penilaian yang baik, penerapan teknik pembelajaran yang beragam, dan pendekatan pengajaran yang efektif. tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan pedagogik mereka secara profesional melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau program pengembangan profesional lainnya. Namun, kesempatan ini seringkali terbatas atau tidak selalu tersedia. Ketidakmampuan untuk memahami dan menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat dikaitkan dengan kompetensi pedagogik yang rendah (Akbar, 2021)

Peran guru dan pelatihan profesional juga menjadi faktor utama dalam kualitas pendidikan. Di Amerika Serikat, guru sering memiliki akses ke berbagai jalur pelatihan profesional dan sertifikasi lanjutan, serta penilaian kinerja yang ketat, sementara di Indonesia program pelatihan guru masih terus dikembangkan terutama melalui penguatan kompetensi pedagogik dan profesional dalam kerangka “Merdeka Belajar”. Keadilan dan akses terhadap pendidikan menjadi tantangan dalam konteks kedua negara, meskipun dengan skala yang berbeda. Indonesia menghadapi disparitas kualitas pendidikan antar daerah, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sedangkan Amerika Serikat memiliki persoalan kesenjangan pendidikan berdasarkan latar sosial ekonomi dan ras.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur komparatif naratif (*narrative comparative literature review*). Metode ini dipilih karena mampu menyediakan sintesis yang mendalam dan kontekstual atas bukti-bukti tematik dari tubuh literatur yang telah ada, sekaligus memungkinkan analisis kritis terhadap kebijakan dan praktik dalam bidang pendidikan komparatif (M. Ling Pan, 2025). Studi literatur tidak hanya berfungsi sebagai pengumpulan sumber, melainkan sebagai proses konstruksi argumentasi melalui interpretasi, evaluasi, dan pengintegrasian temuan dari berbagai teks akademik dan dokumen kebijakan (Fariq & Tambak, 2022)

Data primer penelitian ini terdiri dari dokumen teks akademis dan kebijakan yang dikumpulkan melalui penelusuran multi-database. Sumber data mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi dari database internasional (Scopus, Web of Science) dan nasional (Google Scholar). Prioritas diberikan pada artikel terbitan 2015-2025 yang terindeks di kuartil 1-3 (Scopus) atau SINTA 1-6. Dokumen kebijakan resmi, seperti undang-undang, peraturan menteri, panduan implementasi kurikulum (dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia serta *U.S. Department of Education*), dan laporan evaluasi nasional. Publikasi lembaga internasional (OECD, UNESCO, World Bank) yang menyediakan data komparatif dan analisis kebijakan pendidikan global.

Penelusuran dilakukan dengan teknik bola salju (*snowballing*) dan kata kunci bertingkat. Kombinasi kata kunci digunakan dalam bahasa Inggris dan Indonesia, seperti: "comparative education" AND ("Indonesia" OR "United States"), "education governance" AND decentralization, "Kurikulum Merdeka" AND "policy analysis", serta "teacher professionalism" AND ("standard" OR "development"). Kriteria inklusi meliputi: (a) relevansi langsung dengan minimal satu dari empat tema inti (kurikulum, evaluasi, tata kelola, guru); (b) terbit dalam periode 2014-2025; (c) tersedia dalam akses terbuka (*open access*) atau dapat diakses lengkap; dan (d) merupakan artikel penelitian empiris, kajian konseptual, atau dokumen kebijakan resmi.

Data dianalisis melalui dua tahap integral:

1. Analisis Tematik (*Thematic Analysis*) dengan pendekatan berfaktor kontekstual (John W. Creswell, 2017) Tahap ini meliputi: (a) familiarisasi dengan teks; (b) pembuatan kode inisial; (c) pencarian tema; (d) peninjauan dan penyempurnaan tema; serta (e) penentuan dan penamaan tema utama.
2. Analisis Komparatif Kontekstual (*Contextual Comparative Analysis*). Setelah tema diidentifikasi, dilakukan analisis mendalam untuk membandingkan setiap tema antar-konteks Indonesia dan Amerika Serikat. Analisis ini tidak hanya menyajikan

daftar persamaan dan perbedaan, tetapi juga menginterpretasikannya dengan mempertimbangkan dimensi historis, politik, dan sosio-kultural yang membentuk setiap kebijakan atau praktik, sebagaimana ditekankan dalam studi pendidikan komparatif kritis. Sintesis akhir menghasilkan sebuah kerangka analitik yang mengintegrasikan keempat aspek untuk menjelaskan dinamika dan implikasi dari perbedaan model yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kurikulum dan Tujuan Pendidikan

Kurikulum merupakan dasar perencanaan dan pelaksanaan pendidikan yang mencakup tujuan, isi, serta metode pembelajaran untuk mencapai target pendidikan nasional secara efektif. Di Indonesia, kurikulum dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berdasarkan landasan hukum dan kebijakan pendidikan nasional, yang berorientasi pada Penguatan Profil Pelajar Pancasila serta pembentukan karakter, kompetensi akademik, dan keterampilan abad ke-21 siswa. Kurikulum ini mengalami perubahan berkali-kali dari masa ke masa untuk merespon kebutuhan masyarakat, globalisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi (Abdullah & Indrawan, 2025)

Tujuan pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang dan kebijakan pendidikan nasional yang menekankan pengembangan potensi peserta didik secara holistik termasuk moral, intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Ikhtiar ini bertujuan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter Pancasila, cinta tanah air, serta siap menghadapi kompetisi global. Kurikulum didesain untuk menjawab tujuan ini melalui integrasi pembelajaran karakter, budaya bangsa, serta keterampilan abad ke-21 (Mawaddah, 2019)

Berbeda dengan Indonesia, sistem pendidikan dan kurikulum di Amerika Serikat bersifat terdesentralisasi, di mana negara bagian (state) dan distrik sekolah lokal memiliki kewenangan besar dalam menentukan standar dan isi kurikulum mereka sendiri. Walaupun tidak ada kurikulum nasional tunggal, berbagai kerangka kurikulum seperti Common Core State Standards telah diperkenalkan untuk menyelaraskan penguasaan materi utama seperti bahasa Inggris dan matematika di banyak wilayah. Kurikulum di Amerika Serikat juga menekankan fleksibilitas, inovasi, serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal, sambil berupaya menyiapkan siswa untuk tantangan dunia modern (Haridza & Irving, 2017)

Amerika Serikat, tujuan pendidikan seringkali digambarkan melalui National Education Goals dan misinya yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar sepanjang hayat, mempersiapkan mereka untuk kompetensi global, keberhasilan akademik, serta partisipasi aktif sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Tujuan pendidikan tersebut mencakup penyediaan akses pendidikan berkualitas untuk semua, pencapaian tingkat kelulusan yang tinggi, serta pengembangan kompetensi dasar di berbagai subjek penting termasuk matematika, sains, dan civics (kewarganegaraan). Misi Departemen Pendidikan AS secara eksplisit menyatakan fokusnya pada pencapaian prestasi siswa dan kesiapan kompetitif global (Haridza & Irving, 2017)

Standar kurikulum di California-Amerika Serikat memiliki otoritas untuk menetapkan dan mengubah kurikulum dan metode pembelajaran. Standar pendidikan nasional tidak konsisten. Ini menunjukkan sifatnya yang fleksibel. Selain itu, kurikulum pendidikan Amerika Serikat berfokus pada pengembangan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, dan pembelajaran berbasis proyek, yang merupakan kemampuan penting untuk abad ke-21. Kurikulum California-Amerika juga inklusif, yang berarti menyediakan pendidikan yang inklusif untuk semua kalangan. Indonesia, di sisi lain, menggunakan metode yang lebih terpusat untuk mengelola kurikulum pendidikan dasar. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendidikan, menetapkan kurikulum di seluruh Indonesia (Hayuningrum & Muhtarom, 2024)

Dalam pendidikan, kurikulum sangat penting dan perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, terutama perlu memperhatikan perbandingan pendidikan dari satu negara ke negara lain untuk meningkatkan tolok ukur suatu negara dalam mengenal pendidikan yang relevan dan dapat menciptakan pendidikan yang bermanfaat bagi masa depan. Perbandingan antara negara maju dan negara berkembang dapat menjadi contoh dan peran yang baik untuk pengembangan pendidikan di masa depan, seperti pendidikan di Indonesia dan Amerika Serikat (Loka et al., 2025).

2. Sistem Evaluasi dan Penilaian

Di Indonesia, sistem evaluasi dan penilaian pendidikan telah mengalami transformasi dari pendekatan ujian sumatif menuju asesmen yang lebih holistik. Secara historis, Ujian Nasional (UN) merupakan instrumen utama penilaian capaian belajar siswa yang bertujuan mengukur standar kompetensi nasional, namun kebijakan ini telah dihapus dan diganti dengan Asesmen Nasional dan mekanisme penilaian berbasis proses

pembelajaran untuk mengurangi tekanan psikologis peserta didik dan menekankan pembelajaran bermakna (Tamsiyati & Agissa, 2025)

Standar Penilaian Pendidikan diatur melalui peraturan nasional sehingga kriteria penilaian, instrumen, dan prosedur menjadi pedoman wajib bagi pendidik dan satuan pendidikan. Hal ini mencakup prinsip penilaian yang jelas dan prosedur penentuan hasil belajar siswa (Noven Kusainun, 2020)

Beberapa penelitian juga menyoroti penerapan asesmen autentik sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran yang menilai kemampuan siswa secara komprehensif (kompetensi, proses, dan hasil) dibanding sekadar ujian berbasis pilihan ganda (Jauhari et al., 2017)

Implementasi evaluasi di Indonesia bergerak pada dua jenis utama: formative (penilaian formatif selama proses pembelajaran) dan summative (penilaian hasil akhir). Sebagaimana disoroti dalam beberapa studi, penilaian formatif di Indonesia bertujuan memberi umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sementara penilaian summatif tetap menjadi basis laporan capaian belajar siswa (Rahmadania et al., 2025)

Tantangan yang sering disebut antara lain keterbatasan instrumen yang valid dan reliabel untuk asesmen holistik, kesenjangan kapasitas guru dalam merancang tes formatif, serta tantangan infrastruktur saat mengimplementasikan penilaian berbasis digital (e-assessment), terutama di pendidikan tinggi (Mukhlisa & Makassar, 2025)

Berbeda dengan Indonesia yang memiliki standar nasional, di Amerika Serikat tidak ada sistem penilaian nasional tunggal karena pendidikan dikelola secara desentralisasi oleh negara bagian (state). Namun, terdapat instrumen penilaian besar seperti National Assessment of Educational Progress (NAEP) yang memberikan gambaran capaian belajar secara nasional dan di setiap negara bagian setidaknya setiap dua tahun.

Perbedaan mendasar antara kedua negara terletak pada struktur administratif pendidikan dan tujuan penilaian. Indonesia cenderung mengintegrasikan standar nasional dengan pendekatan holistik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh sebagai respons terhadap kritik sistem ujian berat, sedangkan AS memiliki campuran penilaian lokal, negara bagian, dan instrumen nasional yang kuat namun desentralisasi, dengan fokus signifikan pada akuntabilitas sekolah melalui standar pengujian (Rahmadania et al., 2025)

Kedua sistem menghadapi tantangan umum seperti memastikan keadilan dan validitas penilaian, menyelaraskan asesmen dengan pembelajaran, dan memanfaatkan data evaluasi untuk perbaikan praktik pengajaran dan kebijakan pendidikan. Pembelajaran dari konteks Indonesia dan AS bisa saling memperkaya, khususnya dalam

mengembangkan pendekatan asesmen yang menyeimbangkan kebutuhan belajar siswa, akuntabilitas, dan inovasi pedagogis (Satria, 2024).

3. Tata Kelola Pendidikan

Tata kelola pendidikan di Indonesia diatur secara nasional melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan kerangka bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pendidikan. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pendidikan dan lembaga terkait seperti Ministry of Primary and Secondary Education dan Ministry of Higher Education, Science, and Technology, memiliki peran dalam menetapkan standar nasional pendidikan, kurikulum, dan kebijakan pendanaan pendidikan. Kemudian, pemerintah daerah dan satuan pendidikan melaksanakan kebijakan tersebut secara operasional dengan mempertimbangkan konteks lokal masyarakat dan kebutuhan sumber daya manusia setempat. Namun, studi menunjukkan bahwa birokrasi pendidikan di Indonesia masih sering dipandang terlalu formal dan lamban, yang dapat menghambat fleksibilitas sekolah dalam pengambilan keputusan seperti pengelolaan anggaran, rekrutmen guru, dan kurikulum lokal (Sabrina Syifaurrehman, Jefpi Milda, 2025)

Prinsip tata kelola pendidikan di Indonesia menekankan pada desentralisasi pendidikan dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Sejak era otonomi daerah, pengelolaan pendidikan mencoba memberikan ruang bagi pemerintahan lokal dan masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan pendidikan, termasuk implementasi kurikulum, pemilihan metode pembelajaran, hingga pengelolaan sumber daya manusia pendidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas sistem pendidikan terhadap kebutuhan lokal. Walaupun demikian, masih terdapat tantangan terkait pemerataan kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan serta kapasitas lembaga dalam menerjemahkan kebijakan secara efektif di lapangan (Djunaidi, 2024)

Berbeda dengan Indonesia yang mengadopsi model lebih terpusat pada norma nasional tetapi diimplementasikan secara desentralisasi ke daerah, tata kelola pendidikan di Amerika Serikat secara struktural sangat desentralisasi. Pemerintah federal AS memiliki peran terbatas dalam pendidikan umum, lebih fokus pada isu keadilan pendidikan seperti akses untuk kelompok minoritas atau siswa penyandang disabilitas. Kebijakan pendidikan secara utama ditentukan oleh negara bagian melalui Departemen Pendidikan negara bagian, dan kewenangan operasional di tingkat distrik sekolah lokal serta school boards yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat setempat. Model ini memberikan otonomi yang tinggi untuk menyesuaikan kurikulum dan strategi pembelajaran dengan kebutuhan

komunitas lokal, meskipun juga menimbulkan kompleksitas dan variasi mutu pendidikan antardaerah (Warren, 2018).

4. Peran dan Profesionalisme Guru

Guru di Indonesia memiliki peran strategis sebagai pendidik, fasilitator, pembimbing, dan motivator bagi peserta didik. Profesionalisme guru berkaitan erat dengan kemampuan mereka dalam mengelola pembelajaran, mengembangkan kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Guru profesional tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter siswa serta meningkatkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan literasi digital (Wijaya, 2023)

Sebuah studi menunjukkan bahwa guru profesional memiliki dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, terutama melalui pengembangan kompetensi profesional berkelanjutan dan hubungan positif dengan peserta didik (Sam & Sulastri, 2024)

Profesionalisme guru penting untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan, karena kedalaman penguasaan materi, manajemen kelas, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sistem pendidikan sangat memengaruhi efektivitas proses belajar mengajar (Maullidina et al., 2023)

Profesionalisme guru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dan peraturan pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk menjadikan guru sebagai tenaga profesional yang unggul. Profesionalisme meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan personal yang harus terus diasah melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, dan pengembangan profesional. Perkembangan teknologi edukasi dan perubahan kurikulum membuka tantangan baru yang mengharuskan guru beradaptasi dan mengembangkan keterampilan profesional mereka. Guru yang profesional mampu mendesain pembelajaran responsif terhadap kebutuhan siswa, menerapkan pendekatan pedagogis inovatif, serta memanfaatkan teknologi untuk menunjang efektivitas pembelajaran. (Ali Ridho, 2023)

Di Amerika Serikat, profesionalisme guru juga menjadi fokus penting dalam penelitian ilmu pendidikan, meski konteksnya berbeda dari Indonesia. Profesionalisme guru di AS berkaitan erat dengan standar profesi, pengembangan pengetahuan profesional, etika pendidik, serta tanggung jawab moral terhadap siswa dan komunitas edukasi. Guru profesional di AS dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik kuat,

keterampilan reflektif, serta komitmen terhadap pembelajaran seumur hidup (Tichenor & Tichenor, 2005)

Meskipun guru di kedua negara memiliki peran inti sebagai pendidik dan pembentuk karakter generasi muda, konteks profesionalisme mereka dipengaruhi oleh sistem pendidikan masing-masing. Di Indonesia, profesionalisme guru banyak ditekankan pada penerapan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan personal sesuai standar nasional, serta kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan (Ali Ridho, 2023).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian literatur komparatif yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model pendidikan Indonesia dan Amerika Serikat merepresentasikan dua kutub paradigmatik dalam tata kelola pendidikan global sentralisasi terstandar versus desentralisasi kompetitif. Perbedaan ini bukan bersifat teknis semata, melainkan berakar pada filosofi politik negara, sejarah pembentukan bangsa, dan konstruksi tentang peran negara dalam pendidikan. Indonesia, dengan Kurikulum Merdeka dan Asesmen Nasional, berusaha mencari titik keseimbangan baru dalam kontinum tersebut, bergerak dari model sentralistik kaku menuju desentralisasi terkendali, di mana otonomi diberikan dalam bingkai standar nasional yang tetap kuat.

Kajian ini mengonfirmasi bahwa perbedaan arsitektur tata kelola tersebut berimplikasi sistemik pada tiga dimensi lainnya: (1) kurikulum Indonesia bersifat nasional-terstruktur, sementara AS bersifat lokal-pluralistik; (2) sistem evaluasi Indonesia beralih ke pemetaan sistemik (AN), berbeda dengan tradisi akuntabilitas berbasis tes (*high-stakes testing*) di AS; dan (3) profesionalisme guru di Indonesia dibingkai oleh birokratisasi karier, berbeda dengan otonomi yang diperebutkan di tengah tekanan akuntabilitas eksternal di AS. Namun, kedua sistem sama-sama berhadapan dengan tantangan abad ke-21 untuk mengembangkan kompetensi kompleks siswa, yang mengindikasikan adanya tekanan global yang mengatasi perbedaan konteks nasional.

Kebaruan artikel ini terletak pada sintesis integratif yang menunjukkan bagaimana keempat aspek saling berhubungan secara kausal dan kontekstual. Implikasi utama bagi Indonesia adalah perlunya menghindari adopsi kebijakan secara parsial. Penguatan otonomi ala AS hanya akan berhasil jika diimbangi dengan penguatan kapasitas yang masif di tingkat lokal dan mekanisme equalisasi fiskal yang kuat untuk mencegah kesenjangan. Oleh karena itu, jalan ke depan terletak pada hibriditas kebijakan yang kontekstual untuk mengombinasikan kejelasan tujuan nasional dengan fleksibilitas implementasi lokal, didukung oleh sistem akuntabilitas yang membangun (*constructive accountability*) dan

pengembangan profesi guru yang autentik. Disarankan untuk memperluas kajian dengan menggunakan data empiris lapangan atau melibatkan lebih banyak negara pembanding, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H., & Indrawan, T. J. (2025). *Landasan dan Kebijakan Kurikulum di Indonesia*. 9, 18315-18331.
- Akbar, A. (2021). Pentingnya kompetensi pedagogik guru. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1), 23-30. <https://doi.org/10.32832/jpg.v2i1.4099>
- Djunaidi, D. (2024). Implementation of Community Governance in the Field of Education. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 9(2), 961-972. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v9i2.15992>
- Fariq, W. M., Zamsiswaya, Z., & Tambak, S. (2022). Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, Meta-Analysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kualitatif, Mix Method). *Journal Social Society*, 2(2), 75-84. <https://doi.org/10.54065/jss.2.2.2022.264>
- Haridza, R., & Irving, K. E. (2017). The evolution of Indonesian and American science education curriculum: A comparison study. *Educare*, 9(2), 95-110.
- Hayuningrum, E. A., & Muhtarom, T. (2024). Studi Komperatif Perbandingan Sistem Pendidikan di Negara Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(01), 202-2010. <https://doi.org/10.70294/juperan.v3i01.394>
- Jauhari, M., Rofiki, M., & Al Farisi, Y. (2017). Authentic Assessment dalam Sistem Evaluasi Pengembangan Kurikulum 2013. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 103-116. <https://doi.org/10.33650/pjp.v4i1.908>
- John W. Creswell. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di indonesia dan solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1-13. <https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765>
- Kusainun, N. (2020). Analisis standar penilaian pendidikan di Indonesia. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori dan Praktik*, 5(1). <https://doi.org/10.26740/jp.v5n1.p%25p>
- L Loka, S. C., Al Fares, M., Puspita, L., & Koto, I. (2025). Finding The Common Thread Of The Indonesian Vs United States Education System. *MEDIA DIDAKTIKA*, 11(1), 32-43. <https://doi.org/10.52166/didaktika.v11i1.9371>
- M. Ling Pan, J. S. C. (2025). *Preparing Literature Reviews Qualitative and Quantitative Approaches*. Routledge.
- Maullidina, K., Mulyani, E. S., & Atikah, C. (2023). Pengaruh profesionalisme guru terhadap kualitas pendidikan. *Journal of Education Research*, 4(4), 1731-1736. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i4.519>
- Mawaddah, I. (2019). Trend kurikulum dalam pendidikan sekolah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(3), 293-296. <https://doi.org/10.58258/jisip.v3i3.927>
- Mukhlisa, N. (2025). Implementasi E-Assessment di Pendidikan Tinggi Indonesia: Analisis Tantangan Teknologis dan Pedagogis Berbasis Literatur (2019-2024). *Juara SD: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 4(1), 84-89.
- Rahmadania, R., Rahma, I. D., Iswandi, W., Oktara, Y. R., Asmara, A., & Kashardi, K. (2025). Sistem Evaluasi Dan Asesmen Pendidikan Perbandingan Indonesia Dan Negara Lain. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4 (4), 4441-4447.

- Ridho, A., Suklani., Pengembangan Profesionalisme Profesi Pendidik Di Indonesia. (2025). *SOSPENDIS : Sosiologi Pendidikan Dan Pendidikan IPS*, 1(3), 425-434. <https://lawinsight.net/index.php/SOSPENDIS/article/view/70>.
- Syifaurrehman, S., Milda, J., & Sirozi, M. (2025). Educational bureaucracy in Indonesia and its implications for school governance. *Journal of Educational Sciences*, 9(3), 1255-1264. <https://doi.org/10.31258/jes.9.3.p.1255-1264>
- Sam, R., & Sulastri, C. (2024). Profesionalisme guru dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa. *Arini: Jurnal Ilmiah Dan Karya Inovasi Guru*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.71153/arini.v1i1.74>
- Satria, M. R. (2024). Transformasi standar penilaian pendidikan dan revitalisasi penilaian pembelajaran di Indonesia. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 17(1), 57-66. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v17i1.930>
- Tamsiyati, E., & Agissa, A. W., Yuniar, Y., Junaidah, J. (2025). The Impact of Eliminating National Examinations on Educational Evaluation Quality in Indonesia : A Policy Analysis on Equity and Accountability. *International Journal of Education and Literature*, 4(1), 293-304. <https://doi.org/10.55606/ijel.v4i1.216>
- Tichenor, M. S., & Tichenor, J. M. (2005). Understanding teachers' perspectives on professionalism. *Professional Educator*, 27, 89-95.
- Warren, L. L. (2018). *The Governance of Public Education in the United States of America*. 6 (1), 1-6. <https://doi.org/10.15640/jppg.v6n1a1>
- Wijaya, L. (2023). Peran guru profesional untuk meningkatkan standar kompetensi pendidikan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 1222-1230.